

Kebijakan Kesehatan Berbasis Penelitian di Era Revolusi Industri 4.0

Siti Rahayu
Agus Suprpto
Kristina Palupi



BAB 1

Kebijakan Publik

A. Pengertian

Beberapa ahli memiliki penjelasan masing-masing tentang pengertian kebijakan publik, di antaranya: Thomas Dye, Fischer, Howlett dan Ramesh, Baumer dan Van Horn, serta *white paper* pemerintahan Inggris.

Menurut Thomas Dye (2011) kebijakan publik merupakan studi tentang “*whatever governments choose to do or not to do. What government do, why they do it, and what difference it makes*”, dengan artian apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan itu. Dye tidak hanya fokus pada tindakan yang dilakukan, tetapi juga tindakan yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Definisi kebijakan publik menurutnya lebih ke arah perilaku dan kualitas analisis yang dilakukan oleh aktor kebijakan. Secara tegas diungkapkan oleh Dye bahwa aktor dari kebijakan publik adalah pemerintah dan kebijakan publik merupakan dasar yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Pemerintah Inggris dalam *White Paper*, (1999) menuliskan bahwa kebijakan publik merupakan *“the process by which governments translate their political vision into programs and actions to deliver “outcomes”, desired changes in the real world”*. Terdapat penekanan pada proses di mana pemerintah menerjemahkan visi politik mereka ke dalam program dan kegiatan sehingga didapatkan hasil-perubahan di dunia nyata. Di sisi lain, Fischer (2003) mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut: *Public policy is not only expressed in words, it is literally ‘constructed’ through the language (s) in which it is described*. Kebijakan publik bukan hanya dituangkan dalam perumusan kebijakan saja, tetapi bagaimana hasil kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik harusnya menjadi fokus utama.

Michael Howlett dan M. Ramesh (Howlett et al, 2013) mengemukakan bahwa *public policy is a complex phenomenon consisting of numerous decisions made by numerous individual and organizations. It is often shaped by earlier policies and is frequently linked closely with other seemingly unrelated decisions*. Dengan artian kebijakan publik merupakan fenomena atau kejadian dari tindakan yang dibuat oleh individu atau organisasi. Perumusan kebijakan tersebut biasanya berdasarkan kebijakan yang baru dibuat dengan keputusan yang berbeda.

Selanjutnya, definisi kebijakan menurut Baumer dan Van Horn (2014), yaitu *“... to examine the policy makers and institutions that make public policy. Differences in the politics within these arenas produce different policies and outcomes”*. Dalam kebijakan publik terdapat beberapa

aktor yang berbeda ditinjau dari jabatan politik mereka, perbedaan tersebut menyebabkan keberagaman hasil kebijakan.

Keberagaman hasil kebijakan tersebut dikembangkan dengan pendefinisian kebijakan publik menurut Birkland (2015) bahwa *policy is a statement by government of what it intends to do such as a law, regulation, ruling, decision, order, or a combination of these. The lack of such statements may also be an implicit statement of policy.* Dengan artian kebijakan publik merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah yang berupa hukum, peraturan, keputusan, advokasi, permintaan, atau bahkan keputusan yang bersifat implisit.

Berdasarkan pendapat para pakar tentang kebijakan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan mengandung beberapa unsur, yaitu:

1. Aktivitas pengambilan keputusan yang dilakukan oleh aktor-aktor kebijakan. Aktivitas tersebut berujung pada legitimasi kebijakan merupakan hasil dari pemikiran para pembuat kebijakan. Jika suatu kebijakan tersebut tidak didasarkan pada hasil penelitian maka kebijakan tersebut dinilai hanya berdasarkan opini atau kepentingan para pembuat kebijakan yang bisa dipastikan berpihak kepada kelompok tertentu.
2. Aktor kebijakan utama adalah pemerintah. Aktor-aktor kebijakan merupakan orang/sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk membuat suatu keputusan terhadap permasalahan yang menyangkut kebijakan. Aktor kebijakan terdiri atas beberapa, yaitu: legislatif,

eksekutif, dan yudikatif yang disebut dengan “*trias politica*” dengan aktor utama pembuat kebijakan adalah pemerintah sebagai badan eksekutif.

3. Keputusan diambil untuk mengatasi masalah di masyarakat. Sebuah *agenda setting* dibuat didasarkan pada hasil identifikasi masalah yang terjadi secara riil di masyarakat, bersifat terbaru, dan tidak kedaluwarsa. Kebijakan yang ideal merupakan keputusan legitimasi yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah publik tersebut sehingga sangat diperlukan untuk melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum membuat keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
4. Tujuan akhir adalah mewujudkan tujuan pemerintah. Pada dasarnya, sebuah kebijakan itu dibuat untuk memenuhi tujuan akhir pemerintah kemudian diteruskan menjadi program-program utama. Hal ini bersifat politik yang tidak bisa dihindarkan.

Sesuai dengan point nomor tiga bahwa keputusan diambil untuk mengatasi masalah di masyarakat sudah seharusnya keputusan yang diambil disesuaikan dengan data konkret/riil yang terjadi di masyarakat berupa data, hasil penelitian dan survei, khususnya untuk kebijakan kesehatan.

B. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik didefinisikan sebagai tahapan-tahapan yang dilakukan untuk merumuskan kebijakan publik. Dalam setiap tahap kebijakan memiliki arti dan fungsi yang berbeda. Terdapat beberapa teori yang muncul dari pemikiran ahli mengenai proses kebijakan yang memiliki

perbedaan, maupun kesamaan di antaranya teori tentang proses kebijakan publik menurut Parsons, William Dunn, dan Thomas A Birkland.

Menurut Parsons (2014) bahwa siklus hidup kebijakan terdiri atas: pendefinisian problem, setelah itu proses identifikasi masalah, berupa pemilihan respons atau solusi alternatif. Kemudian melakukan evaluasi opsi yang dipilih dan seleksi opsi, dan dilanjutkan dengan implementasi, kemudian evaluasi. Sejalan dengan itu, Dunn (2013) mengembangkan pemikiran sendiri mengenai proses kebijakan menjadi lima tahapan utama, yaitu *agenda setting*, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Identifikasi masalah sebagai titik awal dari proses kebijakan publik yang merupakan tahapan untuk mengenali akar permasalahan bukan hanya penyebab masalah. Tahapan ini mengungkapkan tuntutan agar pemerintah mengambil tindakan untuk merumuskan secara teliti, teoretis, dan cermat hal-hal yang sebenarnya menjadi akar permasalahan. Kesalahan dalam identifikasi masalah akan mengakibatkan kebijakan publik yang dibuat tidak tepat sasaran, dan menjadi tidak berguna karena tidak dapat menyelesaikan masalah. Setelah akar permasalahan sudah ditentukan dengan benar dan tepat, dilakukan usaha untuk memasukkan masalah ke dalam agenda instansi pembuat kebijakan.

Pada tahap *agenda setting*, pembuat kebijakan memutuskan isu dan permasalahan yang hendak dikemukakan. Aktor kebijakan yang berperan dalam tahapan ini meliputi elite politik, presiden, dan anggota

parlemen. Tahapan ketiga adalah formulasi kebijakan. Di dalamnya terdapat hal-hal yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang telah dipilih dengan tepat di tahap agenda setting dan berbentuk proposal kebijakan. Formulasi kebijakan diartikan juga sebagai tahap proses perumusan kebijakan, yaitu di mana pembuat kebijakan mengembangkan proposal kebijakan untuk menangani masalah. Setelah proses formulasi kebijakan diselesaikan dan kebijakan telah dirumuskan maka tahapan selanjutnya kebijakan harus disahkan menjadi peraturan perundangan agar mempunyai kekuatan hukum mengikat masyarakat.

Saat melakukan legitimasi, pembuat kebijakan harus memilih dengan tepat satu buah proposal yang dinilai terbaik untuk kemudian mencari dukungan politik agar dapat diterima sebagai sebuah hukum dan peraturan baru dapat dilaksanakan. Namun, proses belum selesai karena setelah diimplementasikan selama batas waktu yang ditentukan perlu dilakukan proses evaluasi. Evaluasi kebijakan merupakan tahapan terakhir yang dilakukan melalui studi program, melaporkan *output*-nya, mengevaluasi pengaruh (*impact*) kelompok sasaran dan non-sasaran serta memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan. Tahapan-tahapan kebijakan tersebut memiliki pengertian hampir sama dengan pendapat ahli sebelumnya, yang membedakan hanya pada adopsi/legitimasi kebijakan yang didefinisikan oleh Dunn sebagai tahapan kebijakan untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintah. Sehingga kebijakan yang sudah dirumuskan memperoleh pengakuan untuk dilaksanakan dan bersifat mengikat.